

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Audit BPK Belum Ampuh Sikat Korupsi

Entitas / Cakupan : BPK RI

Sumber / Hal : Media Indonesia/Hal.8

Edisi : Rabu, 14 Desember 2022

Audit BPK belum Ampuh Sikat Korupsi

Indonesia masih merupakan negara yang aman dan nyaman untuk praktik korupsi karena risiko tertangkap tangan yang masih rendah.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
ilham@mediaindonesia.com

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mampu mengungkap banyak pelaku korupsi.

Tak hanya hasil audit BPK, sambungannya, kegiatan pengawasan di inspektorat setiap kementerian/lembaga (K/L) juga tak banyak mengungkap

masalah korupsi atau penyimpangan.

“Dari hasil audit BPK ini sebetulnya belum banyak mengungkap pelaku korupsi. Dari kegiatan pengawasan di inspektorat setiap K/L itu tidak banyak mengungkap perkara korupsi atau penyimpangan,” katanya dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta, kemarin.

Alexander menuturkan mayoritas pejabat yang tertangkap KPK merupakan orang-orang yang hanya kebetulan apes atau tidak beruntung, padahal seharusnya

audit BPK dan pengawasan di inspektorat K/L bisa mengungkap lebih banyak lagi.

Menurutnya, masih banyak oknum yang kejahatannya lebih besar, tetapi belum tertangkap. Mereka sangat lihai dan rapi dalam menyembunyikan harta kekayaan.

Ia menyebutkan risiko tertangkap tangan seorang koruptor di Indonesia masih rendah sehingga banyak koruptor yang merasa aman dan nyaman untuk korupsi.

“Saya kok merasa orang yang tertangkap tangan atau ber perkara terhadap korupsi itu apes. Sebetulnya yang lain kelakuannya sama. Hanya, mereka lebih rapi dalam menyembunyikannya,” jelas Alexander.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu)

Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebenarnya mayoritas institusi sudah memiliki sistem yang akuntabel dan di dalamnya terdapat *check and balance*, tetapi belum berjalan secara efektif, baik disengaja maupun tidak disengaja.

“Karena bisa saja sebuah institusi membentuk *check and balance*, tapi tidak berjalan, baik secara sengaja maupun tidak,” tegasnya.

Peran BPK

Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara yang turut hadir di acara itu mengungkapkan auditor negara berfungsi membantu pemerintah memberantas korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan, berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan

negara yang dilakukan.

“BPK melakukan pemeriksaan yang juga difokuskan pada area-area rawan korupsi sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan atas sistem jika ditemukan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi,” kata I Nyoman.

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Inisiatif strategi tersebut bertujuan mendorong pencegahan korupsi dan menjadi teladan (*role model*) bagi institusi lain. Dalam upaya membantu penindakan kasus-kasus tindak pidana korupsi, lanjut I Nyoman, BPK juga menggelar pemeriksaan investigatif yang bertujuan mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan unsur pidana dalam lingkup pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, auditor negara memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau kerugian daerah. Peran tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum.
(Ant/E-2)